

PERSIAPAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI SMART CITY



Skripsi

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Sarjana Ilmu Politik Pada
Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

ADE PUTRI MANGULUANG

E 11112259

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2016

SEMINAR SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN

PERSIAPAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI *SMART CITY*

Disusun dan diajukan oleh

Ade Putri Manguluang

E111 12 259

Akan dipertahankan dalam Seminar Skripsi

Pada tanggal

Dan di nyatakan telah memenuhi syarat

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Gustiana A.Kambo, M.Si
NIP. 197308131998022001

Pembimbing II

Drs.F.A.Yakub,M.Si
NIP.1962123119990031023

Mengetahui :

Ketua Jurusan
Ilmu Politik dan Pemerintahan

Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 196412311989031027

Plt. Ketua Prodi
Ilmu Politik

Dr.GustianaA.Kambo, M.Si
NIP.197308131998022001

LEMBAR PENERIMAAN

Skripsi

PERSIAPAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI SMART CITY

Disusun dan diajukan oleh

Ade Putri Manguluang

E 11112259

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia Ujian
Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016

Menyetujui

Tim Penguji:

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA

Sekretaris : Endang Sari, S.IP, M.Si

Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.si

Anggota : Dr. Gustiana, M.si

Anggota : A. Naharuddin, S.IP, M.Si

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan, kesabaran, keimanan dan taqwa kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mensupport penulis antara lain, kepada:

1. Terima kasih kepada bapak Prof.Dr.dr.Idrus A. Paturusi, Sp. B. Sp. BO.FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2004-2014 dan Ibu Prof. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan serta Ibu Dr.Gustiana A.Kambo, M.Si selaku Plt Program Studi Ilmu Politik Fisip Unhas.
3. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si dan Drs. H. A. Yakub, M.Si untuk senantiasa memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan dan bimbingan untuk senantiasa tegar dalam memberikan arahan, terima kasih atas segala keramahannya baik selama kuliah

maupun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat kami persembahkan agar senantiasa mendapatkan curahan rahmat dunia dan akhirat.

4. Orang tua penulis yakni ayahanda Afhami Hamzah Manguluang dan Almarhumah Ibunda Nuraeni Ramli yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, kasih sayang, menyalurkan semangat yang tiada hentinya sehingga kalianlah yang menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan.
5. Hormatku kepada Keluarga Besar Ramli Timbang dan kepada saudaraku Iin Nurain Manguluang, Reski Amaliah, Fadlan Manguluang, Hidayat, dan Amirul Haq yang tidak pernah putus asa memberikan keceriaan dan doa serta dukungan kepada penulis baik secara moril maupun material, skripsi ini penulis dedikasikan untuk kebanggaan keluargaku.
6. Terkhusus kepada dosen Pembimbing Akademik, Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si serta dosen pengajar Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA. A. Naharuddin, S.Ip, M.Si. Drs. H.A. Yakub, M.Si. Sakinah Nadir, S.Ip, M.Si. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si. Dr. Muhammad saad MA. Prof,Dr. Armin Arsyad. Endang Sari, S.Ip, M.Si. Terima kasih atas segala kepercayaan, serta prinsip-prinsipnya yang teramat sangat banyak memberikan lilin-lilin kehidupan bagi penulis.
7. Kepada Kecamatan Panakuk kang kota Makassar beserta lurahnya, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Kominfo yang senantiasa membantu dalam pengambilan data di tempat penelitian, terima kasih atas bantuannya selama ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku dikampus Unhas: Nina, Ucham, Ety, Aida, Tanti, Ana. Terkhusus Olan Nur Rakhmat dan Dirham Jayadi, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya.

9. Teman-teman Restorasi 12: Ike, Winny, Fitri, Osink, Arfan, Ari, Kiple, Abang, Ayos, Wiwin, Roslan, Ulla, Fajar, Aan, Reski, Amal, Cimin, Adi, Akmal, Qurais, Irfan, Fadli, Mamat, Nanang dan teman-teman Unhas lainnya, khusus 012 yang telah menjadi teman berbagi cerita dalam suka dan duka selama masa-masa kuliah.
10. Teman-teman KKN Posko Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Firah, Ayu, Kak Marwah, Endy, dan Asho serta Ibu Mardaya selaku ibu posko, terima kasih atas kerjasama, kebersamaan waktu dan kenangan selama KKN telah memberikan kenangan terindah dengan mengenal kalian semua.
11. Kepada teman-teman SMP. Islam Athirah Bukit Baruga Makassar dan SMAN 4 Makassar yang telah menjadi teman berbagi cerita sekaligus memberikan dukungan selama ini, terima kasih.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan saya.

Makassar, Agustus 2016

Ade Putri Manguluang

ABSTRAK

Ade Putri Manguluang. 2012. E11112259. Persiapan Kota Makassar Sebagai Smart City. Pembimbing I: Gustiana A.Kambo. Pembimbing II: H. A. Yakub.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan kebijakan dan kesiapan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar) dalam mewujudkan Makassar Kota Dunia dengan konsep *Smart City*.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang sebagai informan. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, sedangkan pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisa data yang digunakan adalah analisa interaktif yang meliputi, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia dalam konsep *Smart City* menggunakan model kebijakan publik. Model kebijakan publik yang menjadi tipikal dari perumusan kebijakan Ranperda tersebut adalah Model Campuran yang terdiri dari Model Elite dan Model Kelembagaan untuk mewujudkan kota Makassar yang bersih dengan konsep *Smart City*. Dan kurangnya pemahaman SKPD tentang *Smart City*, sehingga menjadi kendala utama dalam prosesnya, terbukti dengan belum terealisasinya konsep tersebut. Ini disebabkan juga partisipatif masyarakat kurang untuk mewujudkan Makassar kota dunia dengan konsep *Smart City*.

Kata Kunci: Smart City, Persampahan, Tata Kota, Perumusan Kebijakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kota Makassar.

ABSTRACT

Ade Putri Manguluang. 2012. E11112259. Preparation of Makassar city as Smart City. Adviser I: Gustiana A.Kambo. Adviser II: H.A Yakub.

Purpose of this research is to know formulation of policy and forwardness SKPD (unit of labour set Makassar city) to actualize Makassar City of World with concept *Smart City*.

This research is constitute qualitative descriptive study. In this research, agency of landscape gardening and sanitation Makassar city, districts Panakkukang as informant. Technique gathering of data with deep interview, observation, documentation, meanwhile taking of samples research is purposive sampling. Data analysis used is interactive analysis which cover data reduction, presentation of data, and conclusion.

Result of this study showing formulating policy for to realize Makassar City of World on Smart City's concept using public policy models, public policy models that become typical from formulating Ranperda policy's is mixed models which consist with Elite model and Institutional model to actualize for Makassar City clean with Smart City's concept, and lack of understanding of comprehension SKPD about Smart City thus becoming main obstacle in that process, it proven by unrealized the concept, this is due also less society participation to actualize Makassar city of world with Smart City concept.

Keywords : Smart City, Sanitation, urban planning, formulation policy, Makassar city.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep <i>Smart City</i>	12
2.2. Kebijakan Publik	20
2.3. Model Kebijakan Publik	28
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
2.5 Skema Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi penelitian	41

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian	41
3.3. Jenis Data Penelitian	42
3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4.1 Wawancara Mendalam	43
3.4.1.1 Tahap Persiapan Penelitian	42
3.4.1.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian	45
3.4.2 Arsip/Dokumen	46
3.5. Teknik Analisis Data	39
3.5.1 Reduksi Data	46
3.5.2 Sajian Data	48
3.5.3 Penyimpulan Data	48

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Daerah Penelitian.....	50
4.1.1 Keadaan Geografi.....	51
4.1.2 Keadaan Demografi	53
4.1.3 Pemerintahan	54
4.1.4 Kondisi Sosial Budaya	57
4.1.5 Sumber Daya Alam	61
4.1.6 Ekonomi dan Keuangan	62

4.2 Visi dan Misi Kota Makassar.....	63
4.2.1 Visi Kota Makassar.....	63
4.2.2 Misi Kota Makassar.....	66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam <i>Smart City</i> di Bidang Persampahan dan Tata Perkotaan.....	68
5.1.1 <i>Smart People</i> dalam Bidang Persampahan dan Tata Kota di Kota Makassar.....	73
5.1.2 Model Kebijakan Publik dalam Bidang Persampahan dan Tata Kota di Kota Makassar.....	79
5.2 Kesiapan SKPD kota Makassar dalam Konsep <i>Smart City</i> di Bidang Persampahan dan Tata Kota.....	84

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Smart City awalnya diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada mulanya *Smart City* bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik. Konsep dan implementasinya pun makin berkembang. Kini *smart city* sudah diterapkan di banyak negara di berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Implementasi *Smart City* juga terjadi di sejumlah kota dan daerah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagaimana kota-kota besar lainnya di dunia, di Indonesia pun kota-kota besar memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Hal ini dipicu dengan pemusatan fasilitas hidup yang lebih baik di daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang besar, tidak merata, dan tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan beragam masalah. Pemasalahan yang muncul bukan saja terkait dengan masalah sosial, tapi juga lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Fakta yang terjadi adalah kecenderungan manusia untuk memadati kota-kota besar, sehingga kota-kota besar berpotensi memiliki permasalahan-permasalahan ini.

Makin banyaknya kota atau daerah di Indonesia yang menerapkan *Smart City* di berbagai bidang kehidupan, diharapkan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkotaan. Beberapa

masalah tersebut antara lain pemukiman kumuh, layanan publik yang tidak memuaskan, angka kejahatan yang meningkat, sampah, banjir, kemacetan dan lain-lain. Dalam skala yang lebih besar, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

Kota Makassar yang dipimpin oleh Dany Pomanto dan Syamsul Rizal sebagai walikota dan wakil walikota Makassar mengangkat Visi “Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua” sebagai visi pemerintahannya. Untuk mencapai hal tersebut Konsep *Smart City* atau Kota Pintar digunakan dalam rangka mewujudkan Makassar yang bernuansa Kota Dunia. Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Visi Pembangunan Daerah berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan

2013-2018 adalah: Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Visi kota Makassar dipertegas dalam perda kota Makassar nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD kota Makassar tahun 2014-2019 pasal 4 ayat 2 bahwa RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi pemerintah kota Makassar.

Program *Smart City* di Kota Makassar menekankan pada berbagai layanan digital (aplikasi sistem berbasis web) dalam menunjang program pemerintah kota makassar dan mendekatkan serta meningkatkan pelayanan ke masyarakat secara *online*. Program tersebut sebagai berikut:

1. *Apartement Lorong (Aparong)*, Pemerintah Kota Makassar akan menyediakan *Apartemen Lorong (Aparong)* yang merupakan bagian dari program Pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). *Aparong* diperuntukkan bagi pekerja MBR dan masyarakat kurang mampu punya lahan tapi tidak anggaran untuk membangun. Menurutny, inovasi tersebut adalah sebuah solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat di bongkar pasang. selain itu rumah ramah lingkungan itu bagi warga kurang mampu.
2. *Home Care, Makassar Home Care* yang lebih dikenal dengan istilah *Dottoro ta'*, sebuah layanan kesehatan berbasis teknologi yang ramah pada pasien karena memungkinkan dokter mengunjungi pasien di rumah-rumah.
3. *Tangkasaki*, Mobil sampah ini nantinya akan dilengkapi dengan CCTV yang rencananya akan di pasang didalam bak sampah untuk mengetahui dan memonitor berapa banyak sampah yang dimuat sampai ke TPA, selain untuk mengetahui apakah mobil sampah itu menjalankan operasionalnya mengangkut sampah warga atau

tidak, karena masalah sampah dan kebersihan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Danny-Ical yaitu *Makassarta Tidak Rantasa (MTR)*.

4. *Free Wi-Fi*, Makassar Akan Dipasangi *Wi-Fi* Gratis 10 Titik di Kecamatan. Pemkot Makassar telah menggandeng PT Telkom untuk menyukseskan program ini, BUMN bidang telekomunikasi tersebut telah siap mendukung program ini. Program Makassar *Smart City* ini akan disosialisasikan ke masyarakat melalui media, sehingga masyarakat mengetahui program tersebut yang lebih banyak memanfaatkan IT lewat dunia maya.
5. *Lorong Garden (Longgar)*, Longgar ini memanfaatkan lorong yang ada menjadi lebih produktif. Dimana diupayakan lorong hijau dan bersih, dengan menanam berbagai tanaman seperti sayur, tomat, cabai, dan lain lain, Danny merencanakan akan membuat badan usaha lorong, dan hasil tanaman ini akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu-ibu yang tinggal di lorong.
6. *CCTV perkotaan*, Pihak Kota Makassar terus berbenah untuk menjadikan makassar sebagai *Smart City*. Salah satu adalah kemudahan mendapatkan informasi *Smart City* dengan mengintegrasikan CCTV seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. *Care and Rescue Center*, Pemerintah kota Makassar menyiapkan "*Carester*" (*Care and Rescue Center*). "*Carester*" kepanjangan Care

and Rescue Center masih langka di Indonesia . Pemerintah Kota Makassar, dalam misi penyelamatan atau tanggap darurat (*rescue*) terdapat tiga peran utama yaitu pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi.

8. *Smart Card*. Program *Smart City* dapat dirasakan warga kota Makassar lewat *Smart Card*, kartu yang mengintegrasikan layanan perbankan, informasi kesehatan, kependudukan dan perpajakan.

Kepemimpinan Dany Pomanto dan Syamsul Rizal telah membuat program *Smart City* khususnya dalam menangani masalah kebersihan dan masalah banjir kota Makassar. Pada periode ini pemerintah kota mencoba merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk cinta dan peduli terhadap kebersihan.

Untuk mewujudkan *Smart City* khususnya menciptakan kota bersih dan bebas dari masalah persampahan serta bebas banjir, saat ini telah mengenal istilah Lihat Sampah Ambil (LISA) , Gerakan *Makassar Ta tidak Rantasa* (Gemar MTR), Lorong Garden (Loggar) yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam mewujudkan *Smart City* Kota Makassar yang berfokus pada kebersihan dan tata perkotaan. Studi ini menjelaskan tentang persiapan program *Smart City* sebagai salah satu kajian dalam menjelaskan konsep pelaksanaan kebijakan walikota Makassar.

Smart City adalah salah satu program pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan “Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”.

Program ini diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek kebersihan dan tata perkotaan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa dukungan masyarakat maka Program *Smart City* tidak dapat berjalan dengan baik.

Setelah dua tahun berlalunya program ini, tampaknya kondisi Kota Makassar masih belum banyak berubah dari sisi kebersihan dan tata perkotaan. Masih banyak ditemui sampah yang berserakan, juga tumpukan sampah di pinggir jalan, masih seringnya terjadi banjir maupun genangan air saat hujan turun yang menyebabkan kemacetan. Belum lagi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan daerah resapan air.

Walikota Makassar dalam menjalankan Program *Smart City* khususnya bidang persampahan dan tata perkotaan telah membuat instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung *Smart City*. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan *Smart City* kepada masyarakat dari rumah ke rumah melalui brosur-brosur. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan *Smart City* dan bagaimana persiapannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat.

Melihat kondisi di atas maka wajar jika sampai saat ini program *Smart City* tidak terealisasi dengan baik. Kekuatan dalam menjalankan *Smart City* juga belum ada, baik Perda maupun Perwali yang membahas

Smart City secara khusus di Kota Makassar. Dari hal tersebut dapat dipertanyakan kesiapan pemerintah terutama SKPD akan kesiapannya dalam menjalankan program *Smart City*.

Dalam pandangan lain, keberadaan sebuah program sebagai instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dapat dilihat dari tinjauan manajemen strategik bahwa program merupakan turunan yang berkesinambungan dari visi dan misi pemerintah daerah dimana hal tersebut memiliki tujuan sasaran serta kebijakan-kebijakan yang didesain sedemikian rupa sehingga melahirkan program dan kegiatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kesinambungan instrumen-instrumen di atas.

Keberadaan program *Smart City* yang tidak memiliki dasar kebijakan yang tidak jelas dikhawatirkan tidak akan terealisasi dengan maksimal dikarenakan ada proses yang tidak berkesinambungan dalam perumusan program yang secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak terhadap pelaksanaan program sebab rantai-rantai proses ini akan membawa visi pada kegiatan nyata dan panduan operasional lapangan untuk aparat pemerintah.

Namun, *Smart City* dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diidealkan. Hal ini bisa dilihat pada berita yang dilansir di media Tribunnews.com, yang menyebutkan bahwa "Solusinya lelang jabatan. Selama ini bukan banyaknya perda yang tak jalan, tapi karena *human error*. Menurut penelitian memang pemimpinnya yang tak bisa

menegakkan perda," ujar Danny, Rabu (8/10/2014) .¹ Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kurang pahamnya SKPD dalam penerapan *Smart City* sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam mewujudkan *Smart City* akibat kurang sosialisasi dari SKPD tersebut. Hal ini dibuktikan dengan transparansi realisasi belanja langsung, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada triwulan I tahun 2016 capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar sebagian buruk alias tidak baik.

Kota Makassar sebagai *Smart City* menjadi bagian dari program pemerintah kota sebagai bagian dari masyarakat global. Program ini tidaklah berjalan sendiri karena harus disandingkan dengan konsep kearifan lokal Makassar, yakni *Sombere* (keramahan). Dengan semangat *sombere*, maka interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, terbangun kebersamaan, semakin *responship*, tingkat improvisasi lebih tinggi, inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara *gesture* (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi. Dengan demikian merekatkan antara *sombere (attitude)* dan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi, hal ini sebagai salah komponen penting penyusun pola birokrasi yang diusung oleh Bapak walikota Makassar dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dengan tagline "Dua Kali

¹ Sumber Tribunnews.com. Rabu, 11 Mei 2016 pukul 17.36 wita

tambah Lebih Baik (2x+), *Smart City* dan kota yang berkelas dunia (*world class*) untuk semua”.

Banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Smart City*, salah satunya, yaitu minimnya kinerja dan pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan *Smart City* serta tidak adanya kekuatan dalam menjalankan *Smart City* juga belum ada, baik Perda maupun Perwali. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perkembangan kota Makassar sebagai *Smart City*, mengingat bahwa pemahaman dan sosialisasi oleh Satuan Perangkat Kerja daerah menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan tercapainya *Smart City*.

Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kesiapan SKPD dan perumusan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan *Smart City* dengan judul “Persiapan Kota Makassar sebagai *Smart City*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perumusan kebijakan pemerintah dalam *Smart City* di Kota Makassar?
2. Bagaimana kesiapan SKPD Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua dalam konsep *Smart City* bidang persampahan dan tata perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menggambarkan perumusan kebijakan pemerintah dalam *Smart City* di Kota Makassar
2. untuk menggambarkan kesiapan SKPD Makassar dalam mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua dalam konsep *Smart City* bidang persampahan dan tata perkotaan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi/respon SKPD dalam mewujudkan program *Smart City*
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan teori yang kokoh untuk mendukung dalam penulisan ini. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat yang bersumber dari yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan buku referensi lainnya.

Adapun yang menjadi landasan penulisan ini meliputi Konsep *Smart City*, Kebijakan Publik dan Model Kebijakan.

2.1. Konsep Smart City

Konsep *smart city* dapat diambil pemahamannya dengan cara melihat dan me-*resume* karakteristik yang tepat untuk sebuah kota cerdas yang cenderung umum dari beberapa sumber. IBM (2008) berpendapat bahwa kota cerdas memanfaatkan teknologi baru dan wawasan untuk mengubah sistem , operasi, dan pelayanan. Sebuah kota dapat dikatakan cerdas ketika memiliki manajemen sumber daya alam (SDA) yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Manajemen tersebut diterapkan pada investasi modal manusia dan sosial, transportasi dan infrastruktur komunikasi modern melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Aspek yang dikedepankan antara lain sumber daya alamnya, pemerintahan, sosial, transportasi, ekonomi, dan kualitas hidup. Kota yang cerdas juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

untuk mendukung pelayanan kotanya serta memperhatikan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga sumber daya alam dan lingkungannya.

Menurut Giffinger menganggap kota cerdas adalah cerdas melakukan pembangunan kotanya dengan cara melihat ke depan. Pendekatan pembangunan kota yang melihat ke depan menuju kota cerdas mempertimbangkan isu-isu, seperti kontribusi, ketegasan diri, kemandirian, dan kesadaran. Terutama isu kesadaran, dimana potensi tertentu hanya dapat dimobilisasi jika masyarakat, swasta, dan pemerintahan menyadari posisi kota, yaitu mengetahui kota tidak hanya dari dalam tetapi juga sadar akan lingkungan sekitarnya. Pembangunan kota yang melihat ke depan dilakukan pada 6 karakteristik yaitu ekonomi, masyarakat kota, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan.

Boyd Cohen (2012), berpendapat bahwa sementara beberapa orang terus mengambil pandangan sempit mengenai *smart city* dengan melihatnya sebagai kota yang melakukan pemanfaatan yang baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi, Cohen sendiri lebih melihat *smart city* sebagai pendekatan terpadu yang luas untuk meningkatkan efisiensi dari operasi kota, kualitas hidup warga kotanya, dan menumbuhkan ekonomi lokal.

Konsep kota cerdas ini memang membicarakan pemanfaatan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya mengenai teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga mengenai

teknologi transportasi modern. Selebihnya juga, berbagai macam aspek pada kehidupan di kota masih berhubungan dengan konsep kota cerdas, seperti keamanan, penghijauan, efisiensi dan keberlanjutan, energi, dan lain-lain. Jadi, diupayakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dalam pemanfaatannya dapat mendukung manajemen sumber daya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kotanya, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan, penghijauan, dan keberlanjutan kotanya.

Amerika Serikat dan Eropa merupakan negara dan benua yang menjadi pelopor *Smart City* di dunia. IBM merupakan perusahaan *enterprise* dunia yang mewadahi berdirinya *Smart City*. IBM membagi *Smart City* menjadi enam jenis pembagian. Giffinger menyatakan pembagian *Smart City* ke dalam enam jenis sebagaimana yang dijelaskan oleh IBM. Keenam jenis pembagian *Smart City* tersebut meliputi *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*.

2.1.1 *Smart Economy*

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang negara/kota/daerah. Pengelolaan ekonomi suatu negara/kota/daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa yang disediakan tapi juga inovasi, kemampuan bersaing, pendidikan dan kewirausahaan. Di Indonesia, salah satu hal yang ingin diterapkan pada implementasi

Smart City adalah *Smart Economy*. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi yang dimiliki berupa Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, maka apabila dikelola dengan baik, ekonomi bangsa Indonesia akan meningkat pesat.

Implementasi dan penilaian *Smart City* pada dimensi *Smart Economy* meliputi dua hal. Kedua hal tersebut yaitu proses inovasi, dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa.

2.1.2 *Smart People*

Smart People dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan *Smart City*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Beberapa kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT.
2. Adanya komunitas IT dan komunitas lain terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan wadah kreatifitas masyarakat.

3. Adanya peran serta aktif masyarakat di dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik memanfaatkan teknologi informasi
4. Modal sosial dalam bentuk kewirausahaan, implementasi teknologi di masyarakat, penghapusan *digital divide* (kesenjangan digital) dan *knowledge divide* (kesenjangan pengetahuan), yang berdampak kepada peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup, dan pendapatan masyarakat.

Dengan adanya *Smart People*, diharapkan dapat tercipta komunitas masyarakat yang *Smart*. Kondisi *Smart* ini dapat diperoleh melalui sejumlah pembelajaran yang dilakukan secara kontinu. Apabila kondisi masyarakat telah menjadi *Smart*, maka pondasi untuk mewujudkan *Smart City* akan tercapai. Bentuk terapan *Smart City* pada satu atau beberapa bidang kehidupan pada kota bersangkutan akan berhasil dengan adanya partisipasi masyarakat setempat yang *smart*, sehingga mampu mengetahui manfaat yang akan di peroleh dan bagaimana mengelola serta mengembangkan *Smart City* tersebut untuk menciptakan tatanan kehidupan dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

2.1.3 *Smart Government*

Smart Government merupakan bagian atau dimensi yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. *Smart Government* meliputi segala syarat, kriteria dan tujuan untuk proses pemberdayaan

dan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan berdemokrasi serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. *Smart Government* terdiri atas tiga bagian, antara lain:

1. Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun *online*.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik.
3. Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas.

Melalui *Smart Government* ini, diharapkan tatanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, melalui keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta proses pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, masyarakat akan melek terhadap teknologi dan pemerintahan, sehingga semua langkah kebijakan dapat benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat.

2.1.4 *Smart Mobility*

Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada *Smart City* yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada *Smart Mobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang *smart*, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan

mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

Terdapat beberapa kriteria di dalam *Smart Mobility*, yang umumnya di implementasikan kedalam ITS (*Intelligence Transport system*). Adapun beberapa kriteria pada *Smart Mobility* tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya pengelolaan trafik di jalan raya yang lebih baik
2. Adanya pengelolaan informasi travel/paket perjalanan berbasis komputer dan teknologi informasi.
3. Adanya kendali yang pintar yang ditanamkan pada alat transportasi berbasis teknologi informasi dan komputer guna menghindari adanya kecelakaan di dalam berkendara
4. Adanya sistem berbasis komputer dan teknologi informasi untuk pengelolaan jumlah armada pada suatu layanan transportasi untuk mengefektifkan biaya operasional serta meningkatkan produktifitas kerja
5. Adanya sistem yang pintar berbasis komputer dan teknologi informasi untuk menyajikan informasi kepada pengguna terkait dengan layanan publik dibidang transportasi
6. Adanya sistem yang pintar berbasis komputer dan teknologi informasi untuk menyajikan solusia transportasi bagi masyarakat di daerah pelosok secara cepat dan mudah

2.1.5 *Smart Environment*

Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada *Smart City* yang mengkhususkan kepada bagaimana lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan *Smart Environment*, perlu adanya terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk *Sensor Network* dan *Wireless Sensor Network*, jaringan komputer , kecerdasan buatan, database sistem, *mobile computing*, sistem operasi, *paralel computing*, *recognition*. *Smart Environment* dibedakan menjadi tiga bagian macam yaitu *Virtual Computing Environment*, *Physical Environment*, dan *Human environment*.

2.1.6 *Smart Living*

Pada *Smart Living* terdapat syarat, kriteria, dan tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *Smart Living*, terdapat tiga bagian yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi
2. Penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi

Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi.

2.2. Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. Beberapa konsep kunci yang termuat (Young dan Quinn, 2002:5-6) adalah 1). Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 2). Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat. 3). Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 4). Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. 5). Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa aktor. Kebijakan publik berisi

sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Definisi lainnya, Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (public term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standard, proposal, dan grand design (Jones, 1984:25). Sementara itu, Anderson menyatakan istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Anderson, 1969:4). Definisi lainnya datang dari Eyestone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971:18)². Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian

² Eyestone dalam Buku Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. 2002

yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap- tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno³ adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

³ William Dunn dalam Buku Budi Winarno Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 2007

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para

pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.⁴

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan

⁴ William Dunn. Dalam buku Budi Winarno, Pengantar Analisis Kebijakan Publik

aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi tahap-tahap berikutnya.

Dari berbagai penjelasan mengenai kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah apa yang diusulkan pemerintah yang mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan konsep kebijakan publik yang digunakan diatas, maka yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

2.2.1 Formulasi Kebijakan

Formulasi (perumusan) kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Formulasi adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari dari kebijaksanaan pengembangan fase atau aktivitas, dan tiada metode yang pasti yang harus dijalankan. Yaitu, bahwa karakteristik khasnya adalah pengertian berguna untuk menyatukan persepsi seseorang tentang kebutuhan yang muncul dalam masyarakat. Bagaimana hal ini dilaksanakan, siapa yang berpartisipasi, dan siapa yang dapat memanfaatkan keuntungan dari satu isu atau masalah ke lainnya.

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak

suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah proses pembuatan suatu keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan di tolak, dan usul-usul yang lain lagi mungkin akan dipersempit. Terdapat beberapa tahap dalam perumusan kebijakan, yaitu:

a. Tahap pertama: Perumusan Masalah (Defining Problem)

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketetapan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.

b. Tahap Kedua: Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang

akhirnya masuk kedalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus kebijakan dan dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

c. Tahap Ketiga: Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antarberbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antaraktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

d. Tahap Keempat: Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat pembentukan kebijakan tersebut.

Dari penjelasan mengenai formulasi kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu proses perumusan kebijakan berisi perumusan masalah-masalah yang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat serta diusahakan oleh para perumus kebijakan untuk mengakomodasi masalah-masalah yang ada. Dalam bab ini, formulasi kebijakan publik lebih dikhususkan kepada pembentukan Peraturan Daerah di tingkat lokal sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugas mengatur.

2.3 Model- Model Kebijakan Publik

Penggunaan model dalam kebijakan publik sangat penting menurut Thoha, manfaat sebuah model akan tergantung pada kemampuannya untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. Selanjutnya diuraikan oleh Thoha tentang model-model kebijakan publik sebagai berikut⁵:

2.3.1 Model Elite (*Policy* sebagai preferensi elite)

⁵ Miftah Thoha dalam buku Budi Winarno Kebijakan Publik: Teori dan Proses

Public policy dalam model elite ini dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Walaupun sering dikemukakan oleh tokoh-tokoh elite itu sendiri, bahwa *public policy* yang dianutnya adalah merefleksi dari tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Hal tersebut tampaknya lebih memancarkan sebagai mitos dibandingkan dari kenyataan yang sesungguhnya.

Teori model elite menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan *public policy* hendaknya dibuat apatis atau miskin akan informasi. Elite secara pasti lebih banyak dan sering membentuk opini masyarakat dalam persoalan-persoalan *policy*, dibandingkan dengan massa membentuk opini elite. Pejabat-pejabat pemerintah, administrator-administrator dan birokrat hanya melaksanakan *policy* yang telah dibuat oleh elite tersebut. *Policy* mengalir dari elite ke massa melalui administrator-administrator tersebut. Bukan sebaliknya berasal dari tuntutan-tuntutan masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* yang dikutip oleh Riant Nugroho D⁶, model elite ini hendaknya menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan publik merupakan abstraksi dari keinginan elite yang berkuasa. Hal ini dapat kita rujuk, pemahaman teorinya, dalam konteks teori politik konvensional yang menatakan bahwa dalam masyarakat hanya terdapat dua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pertama adalah kelompok masyarakat

⁶ Thomas R. Dye dalam buku Riant Nugroho, Analisis Kebijakan

yang berkuasa, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok masyarakat kedua, kelompok masyarakat yang dikuasai. Kelompok masyarakat pertama, yang terdiri atas elite yang berkuasa menyatakan bahwa kenyataan yang berlangsung dalam dunia real pragmatis bahwa pemegang kekuasaan politiklah yang akan melaksanakan tugas formulasi kebijakan.

Dalam teori ini juga tergambar jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan hampir dapat dipastikan akan berwarna kepentingan elite-elite yang berkuasa dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada dasarnya ketika para elite merumuskan kebijakan, maka kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, kebijakan yang menguntungkan dirinya, hingga kebijakan yang berusaha meminggirkan partisipasi publik akan lebih banyak muncul.

2.3.2 Model Kelompok

Teori kelompok mulai dengan suatu ungkapan bahwa interaksi diantara kelompok adalah fakta sentral dari politik dan *public policy*. Thoha menguraikan individu dengan kepentingan-kepentingan mengikat bersama-sama baik formal maupun tidak formal menekankan tuntutan-tuntutannya pada pemerintah.

Kelompok tertentu ini akan menjadi kelompok politik, jika dan manakala kelompok tersebut membuat suatu tuntutan melalui atau tergantung akan institusi pemerintah. Individu-individu amat penting dalam politik hanya ketika mereka bertindak sebagai suatu bagian atau atas

nama dari kelompok yang berkepentingan tersebut. Sehingga dengan demikian kelompok merupakan jembatan yang esensial yang menghubungkan antara individu dengan pemerintahnya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa politik benar-benar merupakan perjuangan di antara kelompok-kelompok untuk memengaruhi *public policy*.

Model kelompok berusaha menerangkan semua aktivitas- aktivitas politik yang bermanfaat di dalam hubungannya dengan “perjuangan kelompok”. Pembuat keputusan dipandang secara ajek menanggapi tekanan-tekanan dari kelompok dengan cara *bargaining, negosiasi, dan kompromi* dari tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D⁷, model kelompok sesungguhnya abstraksi dari konflik kepentingan antarkelompok atau antarpartai dalam suatu institusi atau pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik. Dalam konteks ini, para scholar kebijakan publik, hendak mengatakan bahwa ketika pemerintah hendak memutuskan suatu keputusan politik akan banyak pertikaian kepentingan yang menyertai keputusan tersebut, khususnya konflik kepentingan partai-partai yang berusaha untuk mempertahankan posisi di mata publiknya. Kebutuhan agar tetap mendapat dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum kedepan.

⁷ Thomas R. Dye dalam buku Riant Nugroho, Analisis Kebijakan

2.3.3 Model kelembagaan (*policy* sebagai hasil dari lembaga)

Akhir-akhir ini struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada telah lama menjadi pusat perhatian dari ilmu politik. Lembaga pemerintah memberikan *public policy* tiga karakteristik antara lain:

1. Pemerintah meminjamkan legitimasi kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pada umumnya dipandang sebagai kewajiban yang legal yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Rakyat boleh saja memandang kebijaksanaan-kebijaksanaan dari kelompok-kelompok lain, misalnya perusahaan, organisasi-organisasi profesi, majelis ulama dan lain sebagainya. Akan tetapi, hanya *policy-policy* dari pemerintahlah yang mampu melibatkan semua warga negara untuk mematuhi sebagai kewajiban yang legal.
2. *Policy-policy* pemerintah melibatkan universitas. Hanya *policy-policy* pemerintah yang mampu memasuki dan menjangkau semua rakyat dalam suatu masyarakat. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghindari dari suatu keputusan kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah.
3. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat. Hanya pemerintah yang bisa mengabsahkan tindakannya.

Penting diingat bahwa pengaruh pengaturan kelembagaan dalam *public policy* merupakan persoalan empiris yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Seringkali dijumpai bahwa orang-orang melupakan penelitian

ini. Mereka beranggapan bahwa perubahan dalam kelembagaan akan mengakibatkan juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan akan mengakibatkan juga perubahan dalam kebijaksanaan. Itulah sebabnya menurut Thoha, kehati-hatian amat dibutuhkan untuk dapat mengamati dengan teliti hubungan antara struktur kelembagaan dengan isi *public policy*. Dengan penelitian akan diperoleh pengetahuan bahwa baik struktur lembaga atau isi *public policy* dapat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam lingkungan.

Model institusional juga merupakan model formulasi kebijakan yang berangkat dari turunan politik tradisional yang mengatakan bahwa tugas formulasi kebijakan merupakan tugas sentral lembaga-lembaga pemerintah secara otonom tanpa perlu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Secara sederhana model ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah dan publik selaku pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintah.

2.3.4 Model Proses (*policy* sebagai suatu aktivitas politik)

Thoha menguraikan tentang proses politik dan perilaku telah lama menjadi pusat perhatian. Akhir-akhir ini beberapa ahli ilmu politik telah mencoba untuk mengelompokkan berbagai aktivitas menurut hubungannya dengan *public policy*. Hasilnya ialah adanya serangkaian proses *policy* yang biasanya mengikuti pola umum sebagai berikut:

1. Identifikasi persoalan-persoalan. Tuntutan-tuntutan untuk kegiatan pemerintah
2. Perumusan usul-usul *policy*
3. Pengesahan *policy*. Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut, dan mengesahkan itu sebagai undang-undang hukum
4. Pelaksanaan *policy*
5. Evaluasi *policy*

Dalam model ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang berujung evaluasi kebijakan publik. Secara singkat model ini akan menyatakan bahwa dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para formulator kebijakan agar yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang akan dicapai.

Model proses hanya menekankan bagaimana tahapan aktivitas yang dilakukan di dalam menghasilkan publik *policy*. Model ini kurang memerhatikan isi substansi dari kebijakan yang bakal dibuat. Dengan demikian, sebagian ahli mengatakan bahwa pandangan-pandangan dari model proses ini terlalu sempit dibandingkan dengan model yang lain. Walaupun dikatakan sempit, model ini bagaimanapun mempunyai kegunaan yang besar untuk mengetahui dan memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

2.3.5 Model Rasionalisme (policy sebagai pencapaian tujuan yang efisien)

Prinsip dasar dari model kebijakan ini adalah bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sudah diperhitungkan rasionalitas *costs and benefitnya* bagi warga masyarakat. Ada beberapa tahapan cara yang disusun agar manfaat yang optimum bagi publik dapat terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil:

1. Mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan oleh warga
2. Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan
3. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan
4. Menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis .

Menurut Thoha, rasionalitas ini menganggap bahwa semua preferensi nilai dari suatu masyarakat secara keseluruhan dapat diketahui dan ditimbang. Hal ini berarti bahwa tidak cukup hanya mengetahui dan menimbang nilai-nilai dari kelompok lain. Rasionalitas haruslah mempunyai pengertian yang lengkap mengenai nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembuatan policy yang rasional memerlukan adanya informasi tentang

pilihan-pilihan policy, kemampuan prediktif untuk mengetahui secara tepat akibat-akibat dari pilihan-pilihan policy tersebut, dan kecerdasan untuk menghitung secara tepat perimbangan antara biaya dan keuntungan. Dan yang terakhir pembuatan keputusan yang mampu mempermudah tercapainya rasionalitas di dalam perumusan keputusan.

2.3.6 Model Inkrementalisme (policy sebagai kelanjutan masa lalu)

Model inkremental merupakan model formulasi kebijakan publik yang berusaha untuk merevisi formulasi kebijakan model rasional. Bagi mereka yang menyatakan bahwa model inkremental merupakan revisi dari model rasional, mereka berargumen bahwa para pembuat kebijakan akan kesulitan dan menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengikuti aturan-aturan atau prinsip-prinsip model rasional. Terlalu lamanya waktu dan terus berkembangnya masalah-masalah diatas publik inilah yang menyebabkan perevisi model rasional membangun model pendekatan baru yang kemudian kita kenal dengan model inkremental.

2.3.7 Model sistem (policy sebagai hasil dari suatu sistem)

Model ini merupakan pengembangan dari teori sistem David easton. Dimana menurutnya bahwa suatu kebijakan pubik tidak mungkin terwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar. Karena itu, kebijakan yang ditawarkan oleh model ini adalah model formulasi kebijakan yang berangkat dari output suatu lingkungan atau sistem yang tengah

berlangsung. Dalam pendekatan ini dikenal lima instrumen penting untuk memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan: input, output feedback dan lingkungan itu sendiri. Perlu dipahami pula bahwa input kebijakan publik dalam konteks model sistem tidak hanya berupa tuntutan dan dukungan tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar yang menekankannya.

Model sistem berusaha menggambarkan public policy sebagai suatu hasil output dari suatu sistem politik. Pada konsep sistem terkandung di dalamnya serangkaian institusi dalam masyarakat dan aktivitasnya yang mudah diidentifikasi. Lembaga-lembaga ini melakukan fungsi transformasi dari beberapa tuntutan kedalam suatu keputusan yang otoritatif.

Masukan yang diterima oleh sistem politik dapat berbentuk tuntutan atau dukungan. Tuntutan-tuntutan terjadi ketika individu atau kelompok menanggapi dan mempengaruhi keadaan senyatanya dari lingkungannya. Respon ini diusahakan agar dapat memengaruhi public policy. Adapun dukungan terjadi ketika individu atau kelompok menerima hasil-hasil dari suatu kesepakatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Makin banyaknya kota atau daerah di Indonesia yang menerapkan *Smart City* di berbagai bidang kehidupan, diharapkan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkotaan. Dalam skala yang lebih besar, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

Danny Pomanto – Syamsu Rizal dengan visinya “membangun kota Makassar menjadi kota dunia yang nyaman untuk semua” dengan menggunakan konsep “*Smart City*” nya. Makassar sebagai salah satu kota tertua di Indonesia tentunya memiliki sejarah yang panjang mempengaruhi perkembangan Makassar dikemudian hari.

Pemerintah Kota Makassar untuk mencapai kota dunia yang nyaman untuk semua, melalui Program *Smart City* ini disandingkan dengan sifat budaya lokal Kota Makassar, yaitu *Sombere’* (keramahan) yang memiliki kemajuan dari aspek teknologi namun, tidak meninggalkan budaya serta nilai-nilai lokal dari Masyarakat Makassar itu sendiri.

Program *Smart City* di Kota Makassar menekankan pada berbagai layanan digital (aplikasi sistem berbasis web) dalam menunjang program pemerintah kota makassar dan mendekatkan serta meningkatkan pelayanan ke masyarakat secara *online*. Program tersebut sebagai berikut; (1) *Apartement Lorong*, (2) *Home Care*, (3) *Tangkasaki*, (4) *Free*

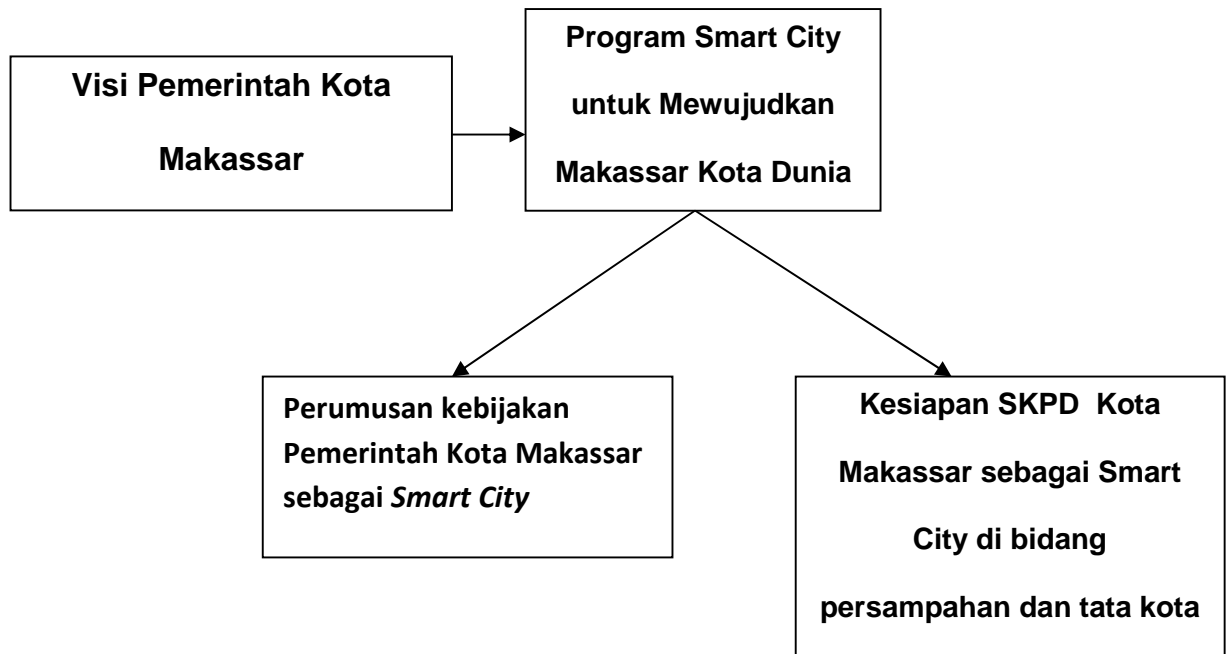
Wi-Fi, (5) Lorong Garden, (6) CCTV Perkotaan, (7) Care and Rescue Center, (8) Smart Card.

Namun, *smart city* dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diidealkan. Hal ini bisa dilihat pada berita yang dilansir di media *Tribunnews.com*, yang menyebutkan bahwa "Solusinya lelang jabatan. Selama ini bukan banyaknya perda yang tak jalan, tapi karena *human error*. Menurut penelitian memang pemimpinnya yang tak bisa menegakkan perda," ujar Danny, Rabu (8/10/2014) .⁸ Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kurang pahamiannya SKPD dalam penerapan *Smart City* sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam mewujudkan *Smart City* akibat kurang sosialisasi dari SKPD tersebut. Hal ini dibuktikan dengan transparansi realisasi belanja langsung, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada triwulan I tahun 2016 capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar sebagian buruk alias tidak baik..

Peneliti berasumsi bahwa, *Smart City* dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan "Kota Makassar Yang Nyaman Untuk Semua", *Smart City* merupakan program pemerintah kota Makassar. Masyarakat sebagai objek dan subjek dari politik merupakan awal dan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

⁸ Sumber *Tribunnews.com*. Rabu, 11 Mei 2016 pukul 17.36 wita

2.5 Skema Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas lima aspek, sebagai berikut : Lokasi Penelitian, Tipe dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Kelima aspek tersebut akan di uraikan lebih lanjut.

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan berdasar asumsi bahwa Kec. Panakkukang ditunjuk sebagai Pilot Project dari program *Smart City* yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif

Tipe Penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang kebijakan pemerintah kota Makassar dalam *Smart City* dibidang

persampahan dan tata kota serta kesiapan SKPD dalam mewujudkan Makassar Kota Dunia melalui *Smart City* di bidang persampahan dan tata kota.

3.3. Jenis Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian yang mampu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data yang didapatkan dari masyarakat di Kota Makassar

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota Makassar dalam *Smart City* dibidang persampahan dan tata kota serta kesiapan SKPD dalam mewujudkan Makassar Kota Dunia melalui *Smart City* di bidang persampahan dan tata kota.

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Wawancara Mendalam dan Arsip / Dokumen.

3.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut.

Salah satu varian dari teknik wawancara adalah wawancara mendalam (*ideep interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman tersebut interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara

berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni :

3.4.1.1 Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan

peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

3.4.1.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Informan yang penulis wawancarai adalah:

1. Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto (walikota makassar)
2. Dr. Syamsu Rizal MI, S.sos, M.si (Wakil Walikota Makassar)
3. H.A. Iskandar (Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)
4. Denny Hidayat (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar)
5. Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Thahir Dg. Ngalli)
6. Kelurahan Se-Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

- 7. Masyarakat
- 8. Aktivis Lingkungan (MasDuli)
- 9. Tokoh Masyarakat
- 10. Media

3.4.2 Arsip/Dokumen

Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan. Data- data ini didapat di masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Respon Kota Makassar sebagai *Smart City*. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit

diungkapkan oleh metode kuantitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3.5.1 Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti rekaman MP3, field note, serta observasi yang dilakukan penulis selama berada di lokasi penelitian. Pada tahap ini sekaligus dilakukan proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan.

Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis yang akan menyeleksi, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, catatan lapangan, dan pengamatan lainnya, peneliti melakukan transkrip data untuk mengubah

data hasil wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Setelah seluruh data sudah dirubah dalam bentuk tertulis, peneliti membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya yakni pengkategorisasian data agar data dapat diperoleh lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sampai disini diperoleh kesimpulan sementara berdasarkan data-data yang telah ada. Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan triangulasi yakni check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya. Apakah sumber data yang satu sesuai dengan data yang lainnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data.

3.5.2 Sajian Data

Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi, dikategorisasi, dan check and recheck antara satu sumber data dengan sumber yang lainnya. Sajian data dapat meliputi deskriptif, matriks dan table. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan mudah memahami dan mengerti.


3.5.3 Penyimpulan Data

Dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti menemukan berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara, kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data akan dipahami dan dikomentari oleh peneliti yang pada akhirnya akan mendeskripsikan atau menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Daerah Penelitian

Kota Makassar (Makassar: , dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat

yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya.

4.1.1 Keadaan Geografi

Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara, Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Masale.

Kecamatan Panakkukang merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian 500 mdpl. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar antara 1-2 km.

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 km². Dari luas wilayah tersebut Kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63km², terluas kedua adalah Kelurahan Panaikang dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Sinrijala yaitu 0,17 km².

4.1.2 Keadaan Demografi

Penduduk Kota Makassar tahun 2013 berjumlah 1.408.072 jiwa yang terdiri dari 695.955 jiwa laki-laki dan 712.117 jiwa perempuan, setelah mengalami peningkatan sejak tahun 2011. Sedangkan tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa yang terdiri dari 676.744 laki-laki dan 692.862 jiwa perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2014 tercatat sebanyak 1.429.242 jiwa yang terdiri dari 667.681 jiwa laki-laki dan 684.455 jiwa perempuan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2012-2014

Nomor	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2012	1.369.606
2	2013	1.408.072
3	2014	1.429.242

Sumber: Badan Pusat Statistik, Makassar dalam Angka 2015

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar yaitu sekitar 97,73 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 185.030 jiwa atau sekitar 13,14 persen dari total penduduk, dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.802 atau sekitar 1,97 persen dari total penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2013-2014 jumlah penduduk Kecamatan Panakkukang mengalami perlambatan sekitar 0,29%, dimana penduduk pada tahun 2013 berjumlah 142.729 jiwa, sedangkan penduduk tahun 2014 berjumlah 142. 308 jiwa.

4.1.3 Pemerintahan

Secara administratif Kota makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, 996 RW, dan 4.968 RT. Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Panakkukang tahun 2014 terdiri dari 11 kelurahan, 470 RT dan 91 RW dengan kategori kelurahan swasembada.

Jumlah anggota DPRD Kota Makassar tahun 2014 sebanyak 50 orang merupakan wakil dari 9 fraksi, 8 orang adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk menduduki jabatan legistlatif .

Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kota Makassar pada tahun 2014 telah menghasilkan 6 peraturan daerah, 22 keputusan dewan, dan 11 keputusan pimpinan dewan.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kecamatan Panakkukang 2014.

No	Kelurahan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paropo	8.042	8.434	16.476	95,35
2	Karampuang	5.344	5.383	10.727	99,28
3	Pandang	5.239	5.678	10.917	92,27
4	Masale	5.757	6.360	12.117	90,51
5	Tamamaung	14.108	14.124	28.232	99,89
6	Karuwisi	5.090	5.512	10.602	92,34
7	Sinrijala	2.201	2.482	4.683	88,68
8	Kariwisi Utara	3.910	3.977	7.887	98,32
9	Pampang	8.909	9.063	17.972	98,30
10	Panaikang	8.129	7.972	16.101	101,97
11	Tello Baru	5.991	5.263	11.254	113,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Makassar dalam Angka 2015

Tabel 4.3. Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Panakkukang 2014

No	Kelurahan	Luas (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kec. Panakkukang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Paropo	1,82	1,04
2	Karampuang	2,25	1,28
3	Pandang	2,21	11,5
4	Masale	2,23	5,25
5	Tamamaung	2,12	1,43
6	Karuwisi	2,5	1,5
7	Sinrijala	0,17	0,017
8	Karuwisi Utara	2,1	1,19
9	Pampang	2,63	3,38
10	Panaikang	2,35	3,32
11	Tello Baru	7,05	9,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, Makassar dalam Angka 2015

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 km². Dari luas wilayah tersebut kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63km², terluas kedua adalah kelurahan Panaikang dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan luas yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Sinrijala yaitu 0,17 km². Tingkat klasifikasi desa atau kelurahan di kecamatan Panakkukang tahun 2014 terdiri dari 11 kelurahan, 470 RT dan 91 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klasifikasi swadaya dan swakarya.

Jumlah aparatur Negara khususnya Pegawai negeri Sipil Kota Makassar baik golongan I pada tahun 2013 sebanyak 271 dan pada tahun

2014 menurun menjadi 151 orang, golongan II pada tahun 2013 sebanyak 2.563 dan menurun menjadi 1.715 orang pada tahun 2014, golongan III sebanyak 5.941 orang pada tahun 2013 dan meningkat sebanyak 6.262 orang di tahun 2014 sedangkan golongan IV pada tahun 2013 sebanyak 7.408 orang dan menurun menjadi 3.036 orang di tahun 2014. Dari keempat golongan PNS tersebut terdapat 70 orang yang bereselon II di tahun 2013 dan tahun 2014 menurun akibat adanya perampingan struktur sehingga menjadi 31 orang. Untuk Eselon III sebanyak 176 orang ditahun 2013 dan menurun menjadi 148 orang ditahun 2014, sedangkan untuk eselon IV sebanyak 1.233 orang ditahun 2013 dan menurun ditahun 2014 menjadi 1.221 orang.

Jumlah eselon ini ditempatkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Dinas sebanyak 17 lembaga tahun 2013 dan tetap 17 lembaga tahun 2013, kantor sebanyak 5 lembaga, badan berjumlah 8 buah ditahun 2013 dan meningkat menjadi 6 kantor dan menurun menjadi 5 badan ditahun 2014.

4.1.4 Kondisi Sosial Budaya

4.1.4.1 Suku dan Etnis

Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan konsentrasi berbagai kegiatan, sekaligus memiliki basis ekonomi dan sumber daya yang relatif lebih baik, infrastruktur yang memadai serta daya tarik investasi disektor-sektor produktif, menjadikan kota Makassar memegang peranan penting dan fungsi penting sebagai pusat pelayanan,

distribusi dan akumulasi barang/jasa dan penumpang, pendidikan, komunikasi dan informasi di kawasan Timur Indonesia. Hal ini menyebabkan penduduk kota Makassar menjadi heterogen, baik yang berasal dari seluruh kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan maupun dari daerah lain di Indonesia bahkan berasal dari Mancanegara.

Mayoritas masyarakat kota Makassar adalah suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Tana Toraja. Makassar sangat terbuka bagi pendatang, sejak berabad-abad lampau telah berbaur berbagai suku bangsa, diantaranya Jawa, Ambon, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Mereka telah membangun komunitas, dan itu dibuktikan dengan keberadaan Kampung Sambung Jawa, Pencinaan, Kampung Melayu, dan Ambon.

Bahasa Makassar, juga disebut sebagai bahasa Makassar atau Mangkasara adalah bahasa yang digunakan penduduk Sulawesi Selatan. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri, yang disebut lontara, namun sekarang banyak juga ditulis dengan menggunakan huruf latin. Selain bahasa Makassar, bahas Bugis, Tator, Mandar juga sering dipakai oleh masyarakat kota Makassar. Namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar sehari-hari bagi masyarakat kota Makassar dalam melaksanakan aktifitasnya. Masing-masing etnis memiliki bahasa yang berbeda-beda. Beragamnya etnis itu juga melahirkan aneka kesenian dan budaya yang malah memperkaya khazanah budaya tradisional di kota Makassar. Saat ini kota Makassar memiliki situs bersejarah sebanyak 47 buah, 1011 sanggar seni dan masih memiliki pemangku adat yang saat ini

masih bertahan sebanyak 5 buah dengan komoditas adat terpencil 7 buah.

4.1.4.2 Kesejahteraan Sosial

Dari jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 1.429.242 jiwa yang terdiri dari 706.814 laki-laki dan 722.428 perempuan terdapat sebahagian penduduk yang kurang beruntung yang hidup di perkotaan sebanyak 54.247 KK, mereka berasal dari sebahagian besar dari penduduk imigran yang datang dari kabupaten lain dan tinggal dan mencari kerja di kota Makassar.

4.1.4.3 Keagamaan

Sebagai kota metropolitan yang memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama, maka pemerintah kota Makassar senantiasa memfasilitasi terwujudnya kerukunan untuk beragama, mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama serta menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.

Dalam hal keagamaan, di kota Makassar terdapat beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Meskipun memiliki penganut agama yang berbeda, namun kerukunan antara umat beragama di Kota Makassar tetap terjaga dengan baik. Sedangkan sarana ibadah yang telah terbangun selama tahun 2014, mesjid sebanyak 1.109 buah, gereja Protestan 134 buah, gereja Katolik 9 buah, Wihara 26 buah, Pura 2 buah

dan Klenteng 1 buah. Khusus di Kecamatan Panakkukang, jumlah tempat ibadah cukup memadai, terdapat 87 buah Masjid, 8 buah Langgar/Mushallah, 22 buah Gereja dan 6 buah lainnya.

4.1.4.4 Pendidikan

4.1.4.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu Negara menentukan karakter dari pembangunan ekonomi sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan angka yang semakin membaik dimana pada tahun 2009 angka IPM sebesar 78,24 meningkat menjadi 78,79 pada tahun 2011. Angka tersebut meningkat pada tahun 2014 sebesar 80,17.

4.1.4.4.2 Pendidikan Umum

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk melihat perkembangan pendidikan secara makro antara lain dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang telah bersekolah dan angka partisipasi sekolah.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus diupayakan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah, dan dengan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Kota Makassar, maka pada tahun 2014 jumlah sekolah dasar sebanyak 542 unit dengan jumlah guru sebanyak 7.921 orang dan jumlah murid sebanyak 155.711. Untuk jenjang SMP sebanyak 231 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 5.284 orang dengan jumlah murid sebanyak 67.096 orang.

Sedangkan untuk jenjang SMA terdapat 151 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 2.935 orang dan jumlah murid sebanyak 38.002 orang. Kota Makassar yang merupakan pusat pendidikan di Kawasan Timur Indonesia terdapat 3 buah Universitas Negeri, yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4.1.5 Sumber Daya Alam

4.1.5.1 Pertanian

Sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tumbuh dan berkembang sebagai daerah perdagangan, pendidikan, industri dan jasa-jasa yang mempunyai daya tarik kepada penduduk migran untuk datang dan bermukim di Kota Makassar sehingga sumber daya alam khususnya lahan pertanian semakin menyempit yang diganti dengan tumbuhnya pemukiman-pemukiman. Penggunaan lahan pemukiman di kota Makassar seluas 7.481 Ha yang disusul oleh penggunaan lahan usaha lainnya sebesar 4,72 Ha. Akibat perkembangan

dan pertumbuhan ekonomi sehingga kota Makassar menjadi daya tarik untuk orang datang dan bermukim maka, luas lahan pertanian khusus lahan tadah hujan semakin berkurang hingga sekarang menjadi 2.700 Ha, tambak ikan 1.360 Ha, lading/tegalan 1.106 Ha, rawa-rawa 104 Ha dan lahan yang belum diusahakan sebesar 194 Ha. Kolam air tawar 32 Ha.

4.1.5.2 Energi

Salah satu faktor yang mendorong tingginya PDRB kota Makassar adalah sektor energi, dalam hal ini penyediaan sumber energi listrik untuk digunakan dalam berbagai bidang. Selain sumber energi listrik dipasok dari Bakaru juga terdapat Pembangkit Listrik Tenaga uap dengan kapasitas produksi sebanyak 200,92 KVA/KWh, kedua sumber energi ini mampu melayani 227.565 Rumah Tangga.

4.1.6 Ekonomi dan Keuangan

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah di kota Makassar pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.601.356.102.560, terdapat kenaikan sekitar 27,14% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.046.125.413.850,00. Sementara realisasi Belanja Daerah di kota Makassar pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.601.356.102.560 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.046.125.413.850,00. Dalam analisis ekonomi wilayah, indikator yang lazim digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, tenaga kerja, perkembangan investasi dan distribusi pendapatan.

4.1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi.

Makassar mengalami berbagai penurunan dibanding 1 tahun sebelumnya. Ekonomi kota Makassar turun 8,91 % pada 2013 atau lebih rendah 0,97% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang mencapai 9,88%. Kontribusi terbesar terhadap perekonomian kota Makassar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,43%), disusul oleh sektor industri pengolahan (18,90%), jasa-jasa (16,31%), transportasi dan komunikasi (14,36%), Bank & Lembaga Keuangan (10,85%), Bangunan (7,73%), listrik, gas, dan air bersih (1,76%), dan pertanian (0,67%). Selain itu, Makassar juga mengalami peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku sebesar Rp 50.702,40 Miliar Rupiah pada 2012 menjadi Rp 58.802,522 Miliar Rupiah pada 2013.

4.2 Visi dan Misi Kota Makassar

4.2.1 Visi Kota Makassar

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dijelaskan dan dijabarkan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar 2025 dan visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018.

Visi Kota Makassar 2025 adalah **“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi**

Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah **“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”**. Terhadap visi Kota Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah:

“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada orientasi global, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai kota dunia, serta penekanan berwawasan lingkungan dan paling bersahabat pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai yang nyaman untuk semua. Pokok visi kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa pada visi RPJPD, dalam visi RPJMD 2013-2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi kota dunia. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi Makassar kota

dunia yang nyaman untuk semua yang merupakan bagian penting dari terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya

kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya masyarakat sejahtera standar dunia.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya kota nyaman kelas dunia.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan

dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok difabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi

4.2.2 Misi Kota Makassar

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Misi selanjutnya diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi masyarakat sejahtera standar dunia.

Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali

pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi kota nyaman kelas dunia.

Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai hal *Smart City* mengenai persampahan dan tata perokotaan di kota Makassar, peneliti membagi dua bagian yakni: (1) perumusan kebijakan pemerintah kota Makassar dalam *Smart City* di Bidang Persampahan dan Tata Kota, serta (2) Kesiapan SKPD kota Makassar dalam konsep Smart City. Dua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

5.1. Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Smart City di Bidang Persampahan dan Tata Perkotaan

Proses formulasi suatu kebijakan publik diperlukan beberapa tahap, seperti perumusan masalah, proses agenda kebijakan, pemilihan alternatif terbaik, dan penetapan kebijakan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Herbert Gans J. (1968:129) menjelaskan bahwa dalam proses formulasi kebijakan merupakan suatu metode untuk membuat keputusan yang mengusulkan atau mengidentifikasi tujuan atau sasaran, menentukan cara atau program untuk mencapai atau yang diperkirakan mencapai akhir, dan dilaksanakan dengan teknik analitis untuk menemukan kesesuaian antara tujuan, cara dan konsekuensi dalam menjelaskan alternatif tujuan dan pengertian.

Smart City secara konsep yang dikemukakan Giffinger menggunakan pendekatan pembangunan kota, yang lebih melihat ke

depan menuju kota cerdas mempertimbangkan isu-isu, seperti kontribusi, ketegasan diri, kemandirian, dan kesadaran. Terutama isu kesadaran, dimana potensi tertentu hanya dapat dimobilisasi jika masyarakat, swasta, dan pemerintahan menyadari posisi kota, yaitu mengetahui kota tidak hanya dari dalam tetapi juga sadar akan lingkungan sekitarnya. Maka, dengan menggunakan konsep pendekatan *Smart City* yang digunakan Giffinger, bahwa Kota Makassar menggunakan *Smart City* didasari atas partisipasi masyarakat Makassar yang tinggi dengan melihat bertambahnya APBD dari tahun ke tahun hal tersebut tergambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Syamsu Rizal⁹, yang mengatakan :

“...APBDnya Makassar itu pada tahun 2015 sebanyak 3,3 triliun (Rupiah), sedangkan uang yang berputar itu sebanyak 86 triliun. Sebelumnya, 2014 itu kita (Pemkot) punya APBD 2,95 triliun, dan uang yang berputar itu 78 triliun. Sedangkan pada Tahun 2016 itu APBD sebanyak 3,5 triliun kemudian yang berputar itu paling sedikit dari bank Indonesia sebanyak 102 triliun. Apakah berarti APBD dari tahun ke semakin turun? Tidak kan. Artinya apa? Partisipasi masyarakatlah sebenarnya yang mempercepat ini kemajuan, sampai bisa tumbuh 9% selama 11 tahun. Kita lihat bahwa partisipasi masyarakat yang membuat kita tumbuh dan lebih sejahtera. Makanya kita buka ruang seluas-luasnya supaya partisipasi masyarakat bisa bergerak dan bisa berkembang, Disitu kita pake smart city. Dan kenapa kita pakai Smart City? Kita (ingin) ungkap kekayaan lokalnya Makassar, supaya semua orang merasa ‘Sirina pacce’ itu yang harus dibangun. Supaya orang kemudian mau berpartisipasi.”

Berdasarkan dari pernyataan Syamsu Rizal tersebut tergambarkan bahwa Ide dasar mengenai *Smart City*, dengan melihat partisipasi

⁹ Wawancara dengan Syamsu Rizal di Taman Sospol unhas, Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 14.35 wita

masyarakat kota Makassar yang terbilang partisipatif terhadap pembangunan kota Makassar, dari tahun ke tahun meningkatnya APBD Makassar dikatakan bahwa masyarakatlah sebagai elemen yang pentingnya. Analisis penulis melihat partisipasi masyarakat kota Makassar merupakan cerminan dari ide *Smart City* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menuju Kota Dunia.

Partisipasi masyarakat yang merupakan wujud dari *Smart Government*. *Smart Government* merupakan salah satu dimensi dan syarat dalam mewujudkan Kota yang Cerdas atau *Smart City*. Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun *online*, dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari terwujudnya *Smart Government* demi mencapai *Smart City* yang pada akhirnya mencapai Kota Dunia. Partisipasi Masyarakat diharapkan tetap mengacu pada kearifan lokal dari budaya Bugis-Makassar, dengan bersandar pada unsur *Siri' Na Pacce*, *Siri Na Pacce* dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyarakat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman terhadap nilai (*siri' na pacce*) ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan hukumnya sehingga *Smart City* yang digunakan kota Makassar tetap manusiawi.

Konsep kota cerdas atau *Smart City* membicarakan pemanfaatan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya mengenai teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga mengenai

teknologi transportasi modern. Pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian masalah di kota Makassar juga tidak lepas dari penanganan masalah persampahan di Kota Makassar. Hal tersebut juga tergambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan oleh Ir. H. A. Herry Iskandar, M.Si¹⁰, yang mengatakan:

“Smart City di bidang kebersihan menyangkut seluruh aspek, salah satunya yaitu untuk memudahkan penanganan dan pengolahan kebersihan. Sekarang ini sudah diserahkan dikecamatan untuk pengolahan sampah, dan kita sebagai DPK (Dinas Pertamanan dan Kebersihan) fungsinya adalah kordinasi dalam hal kordinasi, semua ataukah ada titik sampah di kecamatan itu kita kirim melalui WA atau medsos, untuk mempermudah mewujudkan Smart City dibidang kebersihan. Seperti umpama ada tumpukan sampah disalah satu kecamatan itu, baik pihak dinas maupun masyarakat itu sendiri langsung melapor melalui medsos.”¹¹

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi serta media sosial telah digunakan oleh dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menjalin kordinasi dan komunikasi dengan pihak Kecamatan, hal tersebut juga merupakan media bagi masyarakat dalam menilai kinerja dari aparat pemerintah sehingga menciptakan pemerintahan yang transparan. Dimana dalam dimensi *Smart Government*, transparansi pemerintah sebagai penunjang tercapainya kota cerdas. Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Soppe¹², yang mengatakan:

¹⁰Wawancara dengan Ir.H.A.Herry Iskandar selaku kasubag Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar di Kantor Dinas Pengelolaan Kebersihan, Senin, 8 Agustus 2016 pukul 13.25 wita

¹¹Wawancara dengan Ir.H.A.Herry Iskandar selaku kasubag Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar di Kantor Dinas Pengelolaan Kebersihan, Senin, 8 Agustus 2016 pukul 13.25 wita

¹²Wawancara dengan Soppe selaku Lurah Karuwisi Raya di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.00 wita

“...Misinya Walikota Makassar menuju kota dunia yang nyaman untuk semua, kaitannya dengan smart city untuk mempermudah pelayanan , mempercepat akses dan informasi.”¹³

Berdasarkan pernyataan lurah Karuwisi menggambarkan bahwa pelayanan yang transparan kepada masyarakat merupakan wujud dari *Smart City* yang diinginkan oleh Danny Pomanto dan Syamsu Rizal sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Syamsu Rizal dalam wawancara dengan penelitipun ,menegaskan dan mengatakan bahwa :

“...Smart City itu hanya instrumen yang kita pakai untuk memberi dorongan, mempercepat akselerasinya.sehingga menciptakan pelayanan kepada masyarakat”¹⁴

Tergambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas bahwa, perumusan kebijakan pemerintah kota Makassar dalam *Smart City* berdasarkan dengan partisipasi masyarakat Makassar yang tinggi dalam menanggapi kebijakan pemerintah kota, dan juga *Smart City* hanyalah *instrument* yang digunakan untuk mencapai kota dunia. Adapun, Perumusan atau identifikasi permasalahan yang ada merupakan tahap pertama yang dilalui dalam perumusan kebijakan publik dengan tujuan untuk menemukan jawaban serta penyelesaian dari permasalahan tersebut, dalam hal ini pemerintah kota Makassar telah mengidentifikasi masyarakat Makassar bahwa konsep *Sombere'* dan *Smart City* merupakan paling tepat bagi masyarakat Makassar.

¹³Wawancara dengan Soppe selaku Lurah Karuwisi Raya di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.00 wita

¹⁴Wawancara dengan Syamsu Rizal di Taman Sospol unhas, Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 14.35 wita

5.1.1. Smart People dalam Bidang Persampahan dan Tata Kota di Kota Makassar

Sub bab ini menjelaskan serta memberikan gambaran hasil penelitian mengenai penanganan sampah dan tata kota di Kota Makassar yang menggunakan *Smart City* sebagai *instrument* untuk mencapai Makassar Kota Dunia. Kota Makassar sedang berusaha menjadi kota modern-metropolis di antara jargon-jargon *Water front City*, “Makassar yang Nyaman untuk Semua”, “Kota Dunia 2025”, dan semacamnya.

Jargon-jargon yang digunakan oleh pemerintah kota Makassar diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat dan para investor untuk membangun kota Makassar menjadi kota dunia. Investor dan kaum urban bertarung di dalam ruang kota yang luasnya hanya 175,77 km. Faktanya kota yang semakin modern, akan memberikan dampak langsung pada produksi sampah (limbah). Limbah dalam penelitian ini merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia.¹⁵

Manusia setiap harinya menghasilkan sampah baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Seiring dengan berkembangnya kota Makassar maka perkembangan penduduk Kota Makassar pun akan semakin meningkat, hal tersebut tentu saja meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Makassar. Persoalan pengelolaan sampah menjadi rumit, serumit dinamika sosial penduduknya. Akar

¹⁵(Ign Suharto, 2011 :226)

persoalannya menjadi sistemik, di antara perilaku warga, aparat birokrasi, manajemen dan kebijakan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah mulai dari selokan, kanal, di TPS sampai ke TPA. Produksi sampah organik pada bulan Desember 2014 yang dihasilkan oleh Kota Makassar dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5.1 Komposisi Sampah di Kota Makassar Keadaan bulan Desember Tahun 2014

No	Komposisi	Volume (m ³)	Persentasi(%)
1	Sampah Organik	3.165,73	70,43
2	Kertas Koran	537,14	11,95
3	Plastik	425,66	9,47
4	Metal, Kaleng, Besi, Almunium	162,71	3,62
5	Karet, Ban	126,76	2,82
6	Kaca	43,15	0,96
7	Kayu	31,01	0,69
8	Lain-lain	2,70	0,06
Jumlah		4494,86	100,00

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2015

Data tersebut menggambarkan bahwa produksi limbah organik di Kota Makassar memiliki jumlah yang cukup besar. Maka dibutuhkannya sebuah program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar dalam mengatasi masalah persampahan di kota Makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang

pengelolaan sampah, perwali kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah kota Makassar merupakan wujud dari keseriusan pemerintah kota Makassar dalam menangani permasalahan yang berada di kota Makassar. Secara khusus dalam Perda Kota Makassar No.4 tahun 2011 dan perwali No.3 Tahun 2015 memberikan gambaran mengenai penanganan sampah yang diinginkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar kota dunia. Untuk mencapai Makassar Kota dunia maka dibutuhkan *Smart City* sebagai “alat” yang diharapkan mampu memberikan hasil akhir yang diinginkan, dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan tujuan dari pemerintah Kota Makassar yakni, Makassar Kota Dunia.

Smart City dianggap sebagai pendekatan terpadu yang luas untuk meningkatkan efisiensi dari operasi kota, kualitas hidup warga kotanya, dan menumbuhkan ekonomi lokal. Kota Makassar yang menggunakan *Smart City* sebagai “kendaraan” menuju kota dunia. Jika menggunakan konsep *Smart City* menurut Cohen tersebut, maka pemerintah kota Makassar harus meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat kota Makassar, sehingga menumbuhkan perekonomian kota Makassar. *Smart City* sebagai alat dalam mewujudkan kota dunia dapat tergambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Syamsu Rizal selaku Wakil Walikota Makassar, sebagai berikut:

“Smart City itu hanya sebagian kecil instrumen yang kita gunakan untuk mempercepat kota berstandar kota dunia. Artinya kita sadar bahwa Smart City itu salah satu shortcut...”¹⁶

Adapun *Smart City* yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomato dan Syamsu Rizal juga disandingkan dengan kearifan lokal budaya Bugis-Makassar, yang dianggap sebagai identitas dari masyarakat Makassar, maka pemerintah kota mengemasnya dengan istilah *Sombere’* dan *Smart City*. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsu Rizal mengatakan:

“...(jika) mau lebih cepat kita pake Smart City, sambil membangun konsep-konsep peradaban lokal, kekayaan karakter, budaya, religi lokal, yang selama ini memang menjadi trend image Makassar. Daerah religius, sifat terbuka, Sombere’, semua itu bukan Smart City. Tetapi kita anggap sebagai salah satu kekayaan, makanya kita mem’branding’ itu Sombere’ dan Smart City. Sombere’ itu kekayaan lokal, Smart City itu mewakili visi.”¹⁷

Hal yang dikatakan oleh Syamsu Rizal tersebut menggambarkan bahwa *Smart City* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar tetap berbasis pada manusianya dengan menghargai kerajinan lokal. Kota cerdas (*Smart City*) juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kotanya serta memperhatikan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga sumber daya alam dan lingkungannya.

Pemanfaatan Teknologi merupakan aspek penting dalam melihat kota cerdas bekerja. Makassar sebagai kota cerdas juga memanfaatkan

¹⁶ Wawancara dengan Syamsu Rizal hari, Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 14.35

¹⁷ Wawancara dengan Syamsu Rizal hari, Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 14.35

teknologi dalam menangani masalah di kota Makassar. Hal ini akan dapat terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Zulfikar Luthfi¹⁸, yakni :

“Smart City itu bagian dari program unggulan dari pasangan Danny Pomanto dan Deng Ical.3 (Tiga) program unggulannya Sombere’, MTR dan Smart City, tapi kalo bicara Smart City itukan lebih mengarah ke IT (Informasi dan Teknologi).Menggunakan teknologi serba canggih yang bisa membantu meringankan kita punya pekerjaan sehari-hari dilapangan.”¹⁹

Wawancara peneliti dengan informan di atas menggambarkan pemahaman dari informan mengenai *Smart City* yang lebih mengarah kepada pemanfaatan teknologi, selain itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah sampah di kota Makassar, seperti hasil wawancara peneliti dengan Soppe:

“...masyarakat disana masih banyak yang pelihara ayam, jadi biasa dimuka rumah atau dimuka lorong dia pasang itu kandang ayamnya jadi itu biasa mau dibersihkan, ya kadang ada mau bersih kadang tidak, mau pelihara ayam tapi tidak ada pekarangan, otomatis dilorong disimpan. itulah warga ada yang mau bersih , ada yang tidak. Kalo tata perkotaan, karena tata perkotaan kita dikelurahan hanya memberi rekomendasi, yang mengatur adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan, SKPD biasa datang yang sosialisasi. Memberi penjelasan bahwa sekarang ini ada program smart city, kita sampaikan kepada masyarakat kalau ada misalkan Homecare, dengan melalui Hp kita bisa melihat kegiatan SKPD.”²⁰

Tergambarkan dari hasil wawancara di atas bahwa dibutuhkannya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah persampahan kota Makassar demi mencapai *Smart Living* yang akan membantu tercipta

¹⁸ Wawancara dengan Zulfikar Luthfi selaku Lurah Paropo di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 11.00 wita

¹⁹Wawancara dengan Zulfikar Luthfi selaku Lurah Paropo di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 11.00 wita

²⁰Wawancara dengan Soppe selaku Lurah Karuwisi Raya di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.00 wita

Smart City. Syamsu Rizal sebagai Wakil Walikota Makassar juga memberikan pernyataan mengenai pemanfaatan teknologi dalam penanganan persampahan di Kota Makassar, Syamsu Rizal mengatakan :

“Pertama dari software, kita menggunakan IT tapi, yang paling penting sebenarnya bukanlah Smart City, tetapi attitudenya masyarakat. Makanya, kita membangun pengelolaan persampahan itu berbasis partisipasi masyarakat, yang tidak semuanya smart city dipke konsep .konsep kesadaran, konsep budaya lokal, konsep siri na pacce kita gunakan, bukan smart cty

Partisipasi masyarakat demi tercapainya kota yang nyaman untuk kita semua seperti visi pemerintah kota Makassar, diungkapkan oleh Syamsu Rizal :

“...tapi yang paling penting sebenarnya bukan Smart City tetapi attitude nya masyarakat, makanya kita membangun pengelolaan persampahan itu berbasis partisipasi masyarakat yang tidak semuanya Smart City dipake konsep. Konsep kesadaran, konsep budaya lokal, konsep siri na pacce kita gunakan...”²¹

Konsep kesadaran, budaya lokal dapat dilihat sebagai salah satu dimensi dalam *Smart City*, Yakni *Smart People*. *Smart People* sendiri dikatakan sebagai salah satu penunjang dalam mencapai kota cerdas atau *Smart City*. Dengan mempertahankan kearifan lokal akan memberikan Kota Dunia dengan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Makassar khususnya.

²¹Wawancara dengan Syamsu Rizal hari, Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 14.35

5.1.2. Model Kebijakan Publik dalam Bidang Persampahan dan Tata Kota di Kota Makassar

Melihat perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Nomor 5 tahun 2014 tentang Kota Makassar yang Nyaman Untuk Semua Kota Makassar, peneliti menganalisis perumusan tersebut berdasarkan model kebijakan publik yang ditetapkan untuk acuan, di dapatkan suatu kenyataan bahwa model kebijakan publik yang menjadi tipikal dari perumusan kebijakan Ranperda tersebut adalah Model Campuran yang terdiri dari Model Elite dan Model Kelembagaan. Hal ini dapat tergambarkan dengan hasil wawancara dengan Thahir Dg. Ngalli²², yang mengatakan:

“Perumusan kebijakan itu pertama berasal dari eksekutif, setelah itu dibawa ke legislatif untuk disahkan kalau eksekutif dan legislatif sudah setuju maka itulah menjadi program kita tahunan dan tiap 5 tahun. Program Smart City ini sudah kembali ke eksekutif, program ini tidak berjalan kalau tidak melewati legislatif.”²³

Dalam model elite diperlihatkan bagaimana kelompok yang memiliki kekuasaan (kelompok elite) berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik dan akan memperlihatkan apakah kebijakan tersebut pada akhirnya merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi atau hanya preferensi dari kelompok-kelompok elite. Dalam hal ini, kelompok elite adalah pemerintah Kota Makassar yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perumusan Ranperda Nomor 5 tahun 2014 tentang

²² Wawancara dengan Thahir Dg. Ngalli selaku Camat Panakkukang di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.30 wita

²³ Wawancara dengan Thahir Dg. Ngalli selaku Camat Panakkukang di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.30 wita

Mewujudkan Kota Makassar sebagai Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua dengan konsep *Smart City*. Keinginan untuk mewujudkan Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua dalam konsep *Smart City* adalah usulan yang diungkapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menyikapi permasalahan seperti Persampahan dan Tata Kota dengan konsep *Smart City*, guna untuk mempermudah dalam pembenahan kebersihan kota Makassar.

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) melaksanakan kegiatan berupa optimalisasi truk sampah yang disebut *tangkasa'ki*. Kegiatan yang bersumber dari DPK dengan menata lorong dan melakukan sistem jemput dan pengangkutan sampah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kota Makassar merumuskan kebijakan tentang Kota Dunia dengan konsep *Smart City*.

Model kelembagaan, dapat digambarkan melalui peran pemerintah dalam perumusan kebijakan khususnya pada persampahan dan tata perkotaan. Dalam hal ini, perumusan tersebut yang tertuang dalam kebijakan RPJMD Nomor 5 Tahun 2014 tentang makassar kota dunia dengan konsep *Smart City* dapat dilihat dari lembaga yang berperan seperti Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dari Kecamatan sampai kelurahan.

Model formulasi kebijakan publik yang digunakan adalah Model Campuran yaitu Model Elite dan Model Kelembagaan. Sedangkan terdapat kekurangan yaitu, tidak memainkan Model Teori Kelompok yang

seharusnya membuat perumusan kebijakan publik tidak lepas dari interaksi kelompok-kelompok sehingga akan mencapai suatu titik keseimbangan yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dari kelompok-kelompok dalam Ranperda. Dalam perumusan kebijakan Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua dengan konsep *Smart City* belum melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM yang ada untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan masukan terhadap Ranperda Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua konsep *Smart City* di Kota Makassar. Adapun dalam yang melatar belakangi terciptanya Ranperda tersebut berdasarkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Seperti yang diungkapkan Thahir Dg. Ngalli²⁴:

“Yang melatarbelakangi pasti berdasar pada visi misi walikota yang ingin Makassar nyaman untuk kita semua untuk mempermudah layanan...”

Analisis penulis menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Thomas R. Dye. Thomas R. Dye berpendapat bahwa pemahaman permasalahan kebijakan berkaitan dengan sebuah reaksi terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat yang mendorong timbulnya permintaan suatu pembuatan kebijakan, serta pengembangan berbagai model yang terkait dengan berbagai variabel yang dapat diatasi melalui kebijakan publik²⁵. Berdasarkan hal tersebut dapat tergambarkan dalam perumusan kebijakan berdasarkan dari visi-misi Danny Pomanto-Syamsu

²⁴ Wawancara dengan Thahir Dg. Ngalli selaku Camat Panakkukang di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.30 wita

²⁵ Dikutip dalam Buku Riant Nugroho. 2007

Rizal dalam membangun kota Makassar dengan melihat gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat kota Makassar.

Kota Makassar dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, menghasilkan sekitar 4500 m³ sampah setiap harinya, volume sampah di Kota Makassar bertambah 200 ton per hari, dimana setiap bulannya sampah berkisar antara 600 ton – 800 ton, sehingga bisa di prediksi kalau Volume sampah di Kota Makassar cukup tinggi. Kota dengan luasan 177.557 ha, ini mampu memproduksi sampah hingga 550 ton, atau sekira 4.000 meter kubik per hari , sedangkan dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar hanya mampu menangani sekitar 3500m³ setiap hari. Berarti, ada sekitar 1000m³ sampah di Kota Makassar yang tidak tertangani di tengah masyarakat. Untuk mengatasi masalah kebersihan Kota Makassar maka Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan gerakan revolusi kebersihan di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal.

Ada dua persoalan tentang sampah yang terjadi di kota Makassar ini, yaitu: Pertama, masyarakat yang mempunyai kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan sembarang waktu. Kedua, manajemen persampahan yang belum maksimal. Kedua persoalan dari faktor penghambat itu harus secepatnya diubah dan diperbaiki.

Penanganan sampah memang membutuhkan waktu yang berkesinambungan, namun ketika masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah maka segala bentuk persoalan di kota Makassar akan dapat

terselesaikan. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan di sembarang waktu harus segera di ubah agar kota Makassar bersih, sehat dan tidak rantasa' dapat terwujud.

Membuktikan keseriusan pemerintah kota dengan warganya dalam memerangi sampah, telah dilakukan penandatanganan kontrak pelayanan atau citizen chapter yang ditandatangani 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemkota Makassar. Peran aktif Dinas Kebersihan selaku instansi teknis dituntut agar memastikan sampah yang terkumpul diangkut ke tempat pembuangan sampah tepat waktu. Kepala Dinas Kebersihan tentu harus lebih memaksimalkan fungsi truk angkutan yang dimiliki, dan juga kesejahteraan para pelaku persampahan.

Perpindahan dari sebuah kota biasa menjadi *smart city* memerlukan interaksi komponen teknologi dengan politik dan kelembagaan. Komponen politik mewakili berbagai elemen dan tekanan eksternal, seperti kebijakan politik yang mungkin mempengaruhi ide dari pembuatan *smart city*. Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dari penggunaan sistem informasi. Pemerintah yang inovatif yang ikut serta dalam membangun *smart city* menekankan perubahan dalam suatu kebijakan.

5.2. Kesiapan SKPD kota Makassar dalam Konsep Smart City di Bidang Persampahan dan Tata Kota

Smart city dapat diartikan sebagai "kota cerdas". *Smart City* adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal

kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Sebuah kota dikatakan *Smart* apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut.

Menurut Giffinger menganggap kota cerdas adalah cerdas melakukan pembangunan kotanya dengan cara melihat ke depan. Pendekatan pembangunan kota yang melihat ke depan menuju kota cerdas mempertimbangkan isu-isu, terutama isu kesadaran, dimana potensi tertentu hanya dapat dimobilisasi jika masyarakat, swasta, dan pemerintah menyadari posisi kota. Pembangunan kota yang melihat ke depan dilakukan pada 6 karakteristik, yaitu ekonomi, masyarakat kota, pemerintahan, mobilitas, lingkungan dan kehidupan.

Sebuah kota dikatakan *Smart* apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Ali Harpan²⁶:

*“kota cerdas kalo menurut saya sebuah kota disebut kota cerdas kalo masyarakatnya cerdas, pemerintahnya cerdas, pengusaha atau pelaku ekonomi cerdas, sistem pemerintah cerdas dan budaya cerdas”.*²⁷

²⁶ Wawancara dengan Lurah Tamamaung di Kantor Camat, Kamis 23 Juni 2016 pukul 12.30 wita

²⁷ Wawancara dengan Lurah Tamamaung di Kantor Camat, Kamis 23 Juni 2016 pukul 12.30 wita

Cerdas yang dimaksud disini adalah mampu melakukan aksi terhadap permasalahan yang ada, dan mengambil keputusan yang memajukan masyarakat. Di kota Makassar, penerapan konsep *Smart City* telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah kota-kota terkemuka di Indonesia terutama dalam memaksimalkan pelayanan dan mempermudah segala urusan masyarakat.

Kota Makassar sebagai *Smart City* menjadi bagian dari program pemerintah kota sebagai bagian dari masyarakat global. Program ini tidaklah berjalan sendiri karena harus disandingkan dengan konsep kearifan lokal Makassar, yakni *Sombere'* (keramahan). Dengan semangat *sombere*, maka interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, terbangun kebersamaan, semakin *responship*, tingkat improvisasi lebih tinggi, inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara gesture (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Syamsul Rizal²⁸ :

“...kita (pemerintah kota) menggunakan IT tapi yang paling penting sebenarnya bukan smart city tetapi attitude nya masyarakat makanya kita membangun pengelolaan persampahan itu berbasis partisipasi masyarakat yg tidak semuanya smart city dipake konsep. konsep kesadaran, konsep budaya lokal, konsep siri na pacce kita gunakan, bukan smart city”.

Dengan demikian merekatkan antara *sombere'* (*attitude*) dan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam

²⁸ Wawancara dengan Syamsu Rizal hari, Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 14.35

mewujudkan reformasi birokrasi, hal ini sebagai salah komponen penting penyusun pola birokrasi yang diusung oleh Bapak walikota Makassar dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dengan tagline “Dua Kali tambah Lebih Baik (2x+), *smart city* dan kota yang berkelas dunia (*world class*) untuk semua”.

Pemerintah kota Makassar dalam menjalankan Program *Smart City* khususnya bidang persampahan dan tata perkotaan telah membuat instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung *Smart City*. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan *Smart City* kepada masyarakat dari rumah ke rumah melalui brosur-brosur. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan *Smart City* dan bagaimana persiapannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat.

Selama dua tahun memimpin Makassar, Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto, mendapat banyak manfaat dari pemanfaatan teknologi informasi (TI). Dengan TI, ia mengubah Makassar menjadi sebuah smart city dan tak melupakan jati diri atau budaya Makassar, sehingga terciptalah *Sombere'* (keramahan) dan *Smart City*. Perpaduan budaya dan teknologi ini membuat warga Makassar semakin melek teknologi yang berujung pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbagai hal di sendi kehidupannya.

Dalam mewujudkan *Smart City* khususnya menciptakan kota bersih dan bebas dari masalah persampahan dan bebas banjir, saat ini telah mengenal istilah Lihat Sampah Ambil (LISA) , Gerakan *Makassar Ta tidak Rantasa* (Gemar MTR), Lorong Garden (Loggar) yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam mewujudkan *Smart City* Kota Makassar yang berfokus pada kebersihan dan tata perkotaan. Studi ini menjelaskan tentang persiapan program *Smart City* sebagai salah satu kajian dalam menjelaskan konsep pelaksanaan kebijakan walikota Makassar.

Keinginan untuk mewujudkan Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua dalam konsep *Smart City* adalah usulan yang diungkapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menyikapi permasalahan seperti Persampahan dan Tata Kota dengan konsep *Smart City*, guna untuk mempermudah dalam pembenahan kebersihan kota Makassar, bentuk wujud partisipasi pemerintah dalam hal Persampahan dan Tata Kota terlihat dari adanya persiapan berupa saran untuk pengangkutan sampah, seperti yang dikatakan Thahir Dg. Ngalli :²⁹

“Untuk sampah saya sudah mempersiapkan trucking, saya sudah mengusul ke telkom agar saya tau petugas kebersihan sekarang berjalan dimana melalui smartphone.”

Dari hasil wawancara tersebut, disini digambarkan adanya partisipasi pemerintah dalam hal mewujudkan menciptakan kota bersih

²⁹ Wawancara dengan Thahir Dg. Ngalli selaku Camat Panakkukang di Kantor Kecamatan Panakkukang, Kamis 23 Juni 2016 pukul 10.30 wita

dan bebas dari masalah persampahan dan bebas banjir, ini dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Azis Adam M :³⁰

“...khususnya menyangkut persampahan dan tata lorong, terbukti dengan adanya Fukuda, ada sistem penjemputan sampah setiap lurah.”

Hal yang dikatakan oleh Azis Adam M tersebut menggambarkan bahwa adanya wujud partisipasi Pemerintah Kota Makassar dalam hal menangani masalah persampahan di kota Makassar. selain penanganan yang cepat dan tepat, Kota cerdas (*Smart City*) juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kotanya agar dapat ditangani dengan cepat.

Pemanfaatan Teknologi merupakan aspek penting dalam melihat kota cerdas bekerja. Dalam hal ini teknologi informasi juga digunakan dalam penyelesaian penanganan masalah persampahan di Kota Makassar. Hal tersebut juga tergambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan oleh Ir. H. A. Herry Iskandar, M.Si, yang mengatakan:³¹

“Smart City di bidang kebersihan menyangkut seluruh aspek, salah satunya yaitu untuk memudahkan penanganan dan pengolahan kebersihan. Sekarang ini sudah diserahkan dikecamatan untuk pengolahan sampah, dan kita sebagai DPK (Dinas Pertamanan dan Kebersihan) fungsinya adalah kordinasi dalam hal kordinasi, semua ataukah ada titik sampah di kecamatan itu kita kirim melalui WA atau medsos, untuk mempermudah mewujudkan Smart City dibidang kebersihan. Seperti umpama ada tumpukan sampah disalah satu kecamatan itu, baik pihak dinas maupun masyarakat itu sendiri langsung melapor melalui medsos.”

³⁰ Wawancara dengan Lurah Tallo Baru di Kantor Kecamatan, Kamis, 23 Juni 2016 pukul 12.45 wita

³¹ Wawancara dengan Ir.H.A.Herry Iskandar selaku kasubag Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar di Kantor Dinas Pengelolaan Kebersihan, Senin, 8 Agustus 2016 pukul 13.25 wita

Dari hasil wawancara tersebut, disini sudah tergambarkan bahwa p dinas Pertamanan dan Kebersihan telah memanfaatkan teknologi serta media sosial digunakan dalam menjalin kordinasi dan komunikasi dengan pihak Kecamatan tentang adanya titik-titik sampah guna mewujudkan *Smart Enviroment*

Beragam masalahpun muncul dalam pelaksanaan *Smart City*, salah satunya, yaitu minimnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan *Smart City* karena kurangnya pengetahuan SKPD tentang program program *Smart City* seperti yang di ungkapkan Ali Harpan :³²

*“SKPD secara umum belum maksimal bahkan minimal mungkin karena mereka kan disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan sendiri, ada beberapa SKPD yang masih bingung dukungan seperti apa diberikan ke kecamatan atau lurah karena itu masih sesuatu sangat baru.”*³³

Dari hasil wawancara diatas, disini tergambarkan kurangnya pengetahuan SKPD tentang program program *Smart city* menyebabkan kebingungan akan dukungan seperti apa yang akan mereka sumbangkan demi menyukkseskan program *Smart city*, sehingga dalam hal sosialisasi, pihak SKPD masih belum dikatakan maksimal, karena bagi SKPD, *Smart city* adalah sesuatu hal yang masih baru, Karna kendala tersebut, masyarakat menjadi awam tentang apa itu *Smart city*, walau pemerintahan sudah melakukan sosialisasi, tapi masih banyak

³² Wawancara dengan Lurah Tamamaung di Kantor Camat, Kamis 23 Juni 2016 pukul 12.30 wita

³³ Wawancara dengan Lurah Tamamaung di Kantor Camat, Kamis 23 Juni 2016 pukul 12.30 wita

masyarakat belum paham akan hal itu, hal ini tergambar jelas dari ungkapan Ali Harpan :³⁴

“... masyarakatnya masih awam dengan smart city, walaupun walikota sudah sosialisasikan smart city tapi masih banyak masyarakat yang belum paham dan tidak tau apa yang mereka lakukan.”

Disini tergambar jelas, walau pemerintah sudah melakukan sosioalisasi, karena pengetahuan SKPD yang masih belum memumpuni akan pemahaman tentang program program *Smart City*, malah mengakibatkan kebingunan pada masyarakat, sehingga masyarakat juga bingung apa yang harus mereka lakukan agar program program *Smart City* dapat tercapai.

Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang program *Smart City* seperti yang diungkapkan Azis Adam M :³⁵

“Kendalanya saya kira masalah SDM-nya perlu pengembangan, infrastruktur sementara pembenahan.”

Disini dijelaskan bahwa yang menjadi kendala disini adalah SDM-nya, masih diperlukan pemberian pemahanan akan program program *Smart City*, walau pembenahan infrastruktur sedang berjalan, jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan SDM yang memadai, maka akan menjadi “batu sandungan” dalam pencapaian kota Makassar sebagai *Smart City*.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perkembangan kota Makassar sebagai *Smart City*, mengingat bahwa pemahaman dan

³⁴ Wawancara dengan Lurah Tamamaung di Kantor Camat, Kamis 23 Juni 2016 pukul 12.30 wita

³⁵ Wawancara dengan Lurah Tallo Baru di Kantor Kecamatan, Kamis, 23 Juni 2016 pukul 12.45 wita

sosialisasi oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan tercapainya *Smart City*, melihat kondisi di atas maka wajar jika sampai saat ini program *Smart City* tidak terelisasi dengan baik. Dari hal tersebut perlu diperhatikan tentang kesiapan pemerintah terutama SKPD akan kesiapannya dalam menjalankan program *Smart City*.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dalam perumusan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam *Smart City*, pemerintah Kota Makassar mengambil acuan berdasarkan model kebijakan publik, model kebijakan publik yang menjadi tipikal dari perumusan kebijakan Ranperda tersebut adalah Model Campuran yang terdiri dari Model Elite dan Model Kelembagaan. Disini dapat dipahami bahwa bagaimana kelompok elit memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan dan akan memperlihatkan apakah kebijakan tersebut pada akhirnya merupakan kebutuhan masyarakat atau hanya sebagai preferensi dari kelompok-kelompok elit, Jika melihat perumusan kebijakan RPJMD Nomor 5 Tahun 2014 tentang makassar kota dunia dengan konsep *Smart City*, terlihat terdapat beberapa lembaga yang berperan didalamnya, seperti Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar, hal ini mengacu pada model kelembagaan, sedangkan Model formulasi kebijakan publik yang digunakan adalah Model Campuran yaitu Model Elite dan Model Kelembagaan, namun didalam model ini masih terdapat kekurangan yaitu, tidak memainkan Model Teori Kelompok, seharusnya dalam membuat perumusan kebijakan publik tidak lepas dari interaksi kelompok-kelompok sehingga akan mencapai suatu titik keseimbangan yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dari

kelompok-kelompok dalam Ranperda. lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM belum ada yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan Kota Dunia yang nyaman untuk semua dengan konsep *Smart City*,

2. Dalam mewujudkan *Smart City*, khususnya menciptakan kota bersih dan bebas dari masalah persampahan dan bebas banjir, saat ini telah mengenal istilah Lihat Sampah Ambil (LISA) , Gerakan *Makassar Tidak Rantasa* (Gemar MTR), Lorong Garden (Loggar) yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam mewujudkan *Smart City* Kota Makassar yang berfokus pada kebersihan dan tata perkotaan, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pembenahan infrastuktur dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan makassar bebas dari masalah persampahan dan pembenahan lorong, namun dalam prosesnya terdapat kendala utama, yaitu kurangnya pemahaman SKPD tentang program *Smart City*, terbukti belum terealisasinya konsep tersebut. Ini disebabkan juga partisipatif masyarakat kurang untuk mewujudkan Makassar kota dunia dengan konsepa *Smart City*.

6.2 SARAN

1. Seharusnya membuat perumusan kebijakan publik tidak lepas dari interaksi kelompok-kelompok sehingga akan mencapai suatu titik keseimbangan yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dari kelompok-kelompok dalam Ranperda. Dalam perumusan kebijakan

Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua dengan konsep Smart City belum melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM yang ada untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan masukan terhadap Ranperda Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua konsep Smart City di Kota Makassar. Adapun dalam yang melatar belakangi terciptanya Ranperda tersebut berdasarkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam membangun kota Makassar dengan melihat gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat kota Makassar.

2. Demi mencapai Kota Makassar sebagai *Smart City*, khususnya dalam bidang persampahan dan tata kota, seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di persiapkan dengan pengetahuan yang memumpuni akan program program *Smart City* yang akan mereka jalankan, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan sehingga belum terealisasi konsep tersebut dengan baik, dan ketika melakukan sosialisasi, masyarakat juga paham guna program *Smart City*, dan menjadi antusias dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai *Smart City*, sehingga kerjasama antara pihak pemerintah, SKPD, dan masyarakat semakin terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AG.Subarsono. 2005. **Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta
- Agustino, Leo S. 2012. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung: ALFABETA
- Dunn, Willian N.1999. **Pengantar analisis Kebijakan Publik**, Ed. Kedua. GMUP, Yogyakarta
- Gafar, A.A.Said. **Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian**, Pustaka Setia, Bandung
- Huntington, Samuel P, **Tertib Politik Pada Masyarakat yang Sedang Berubah**, CV. Rajawali, Jakarta
- Nugroho. Riant. 2007. **Analisis kebijakan**. Jakarta: gramedia
- Nugroho,Riant. 2014, **Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurmandi, Achamd. 2014, **Manajemen Perkotaan**, JKSG, Yogyakarta
- Parson, Wayne. 2014. **Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan**. Kencana. Jakarta
- Pomanto, Ir. H. Moh. Ramdhan. 2014. **8 Jalan Masa depan, Mainstream Baru Pembangunan Makassar**. Makassar: Pelita Pustaka
- Pratam, I Putu Agus Eka. 2015. **Smart City beserta Cloud Computing dan Teknologi- Teknologi Pendukung Lainnya**, Informatika, Bandung
- SD, H.Soenarko, 2000, **Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah**, Airlangga University Press, Yogyakarta
- Sevilla, Consuelo G, 1993, **Pengantar Metode Penelitian**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2010. **Analisis Kebijakan Publik**, ALFABETA, Bandung
- Tahir, Dr. Arifin. 2014. **Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Bandung: ALFABETA

Wahab, Solichin Abdul. 2006. **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara

Budi Winarno. 2007. **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Jakarta: Media Pressindo

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Perda Kota Makassar No. 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah kota Makassar

Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2014-2019

Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pengelolaan Daur Ulang Sampah Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

INTERNET

www.makassarkota.go.id

www.makassartidakrantasa.com

MAKNA SIRI' NA PACCE' DIMASYARAKAT BUGIS-
MAKASSAR.....FRISKAWINI | IMBASADI

Ternyata Ini Yang Dimaksud Danny Soal Makassar Kota Dunia | Makassar
Terkini

Wawali Makassar paparkan smart city-sombere - ANTARA News
Makassar - ANTARA News Makassar - Berita Terkini Makassar